



# 2023

## L K j I P

✉ [diskominfo.sampangkab.go.id](mailto:diskominfo.sampangkab.go.id)  
🌐 [diskominfo@sampangkab.go.id](mailto:diskominfo@sampangkab.go.id)  
☎ (0323) 321550/325987  
📄 69216



**PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

# Pengantar



Puji syukur ke hadirat Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa, atas petunjuk dan rahmat-Nya kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang Tahun 2023. LKjIP ini disusun sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas atas pelaksanaan tupoksi organisasi kepada publik, yang bersifat tahunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini disusun mengacu pada Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan dimaksud memuat pencapaian kinerja sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019 – 2024 Kabupaten Sampang. Program serta kegiatan yang telah dilaksanakan dimaksudkan sebagai bentuk peran serta aktif Dinas Komunikasi dan Informatika dalam rangka mewujudkan good governance. Disamping perwujudan tertulis akuntabilitas kinerja perangkat daerah, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) mempunyai fungsi antara lain sebagai :

1. Media hubungan kerja organisasi;
2. Media akuntabilitas;
3. Media informasi umpan balik perbaikan kinerja; dan
4. Instrumen peningkatan kinerja berkesinambungan.

Selain beberapa fungsi tersebut, LkjIP juga disusun dengan maksud untuk memberikan informasi kepada publik terkait capaian kinerja Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Sampang Tahun 2023 dalam memberikan layanan kepada masyarakat, beserta beberapa kendala dan hambatan yang dihadapi untuk dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan perencanaan di tahun berikutnya. Dalam penyusunan LKjIP ini tentu tidak terlepas dari kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu saran dan kritik dari pihak-pihak terkait sangat diharapkan agar tercapainya kesempurnaan dalam penyusunan LKjIP ini.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Sampang



**AMRIN HIDAYAT, S.Kom., M.A.P.**

Pembina

NIP. 19721026 200501 1 007

# DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>ii</b>
<b>Daftar isi .....</b>	<b>iv</b>
<b>Ikhtisar Eksekutif.....</b>	<b>v</b>
<b>Bab I Pendahuluan.....</b>	<b>1</b>
A. Struktur organisasi.....	3
B. Tugas dan fungsi.....	5
C. Isu strategis.....	9
D. Cascading kinerja.....	9
E. Aspek strategis dan permasalahan perangkat daerah .....	10
F. Peta proses bisnis.....	12
G. Realisasi anggaran.....	17
<b>Bab II Perencanaan Kinerja .....</b>	<b>21</b>
A. Rencana Strategis Tahun 2019-2024 .....	21
B. Perjanjian kinerja .....	23
<b>Bab III Akuntabilitas Kinerja.....</b>	<b>25</b>
A. Capaian Kinerja .....	25
B. Analisis Capaian Kinerja.....	26
C. Realisasi anggaran .....	36
<b>Bab IV Penutup .....</b>	<b>48</b>

# IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang Tahun 2023 menyajikan berbagai upaya dan hasil pada Tahun 2023 yang terdiri dari 2 (dua) Sasaran strategis. Target kinerja yang telah ditetapkan secara umum dapat terpenuhi, dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa indikator yang belum dapat tercapai.

Selain pencapaian target tahun 2023, laporan kinerja tahun 2023 ini juga merupakan langkah tahun ke 5 (lima) pencapaian target-target yang telah ditetapkan pada Renstra 2019 – 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika.

Secara keseluruhan keberhasilan program-program sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara dan masyarakat. Uraian tingkat ketercapaian dan ketidak-capaian indikator akan lebih detail diuraikan pada Bab III.

1

## Meningkatnya Penerapan e-Government

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase OPD yang sistem Informasinya (aplikasi) terintegrasi	65%	71.43%	109.89%

2

## Meningkatnya Kualitas Informasi dan Komunikasi Publik

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Informasi dan Komunikasi Publik yang Berkualitas	80%	73.75%	92.19%

# BAB I

# PENDAHULUAN

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita - cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan dan didasarkan pada TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan perubahannya. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan Strategis yang ditetapkan oleh masing- masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Berdasarkan uraian diatas, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang telah menyusun sebuah laporan guna mempertanggungjawabkan segala kinerja yang telah dilaksanakan baik keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

Sedangkan evaluasi terhadap pelaksanaan rangkaian program dan kegiatan tersebut beserta capaiannya bertujuan untuk :

1. Mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas sekaligus peningkatan akuntabilitas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang sendiri;
2. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas yang diemban dan telah dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sekaligus sebagai sarana evaluasi bagi setiap program dan kegiatan-kegiatan Dinas;
3. Menciptakan *self-assessment* (penilaian diri) yang diharapkan akan memberikan koreksi, perbaikan dan dorongan (*feed back*) untuk kinerja yang lebih baik dimasa yang akan datang.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang Tahun 2023 dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang adalah sebagai sarana bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada publik atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya yang telah dipercayakan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Sampang. Selain sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka :

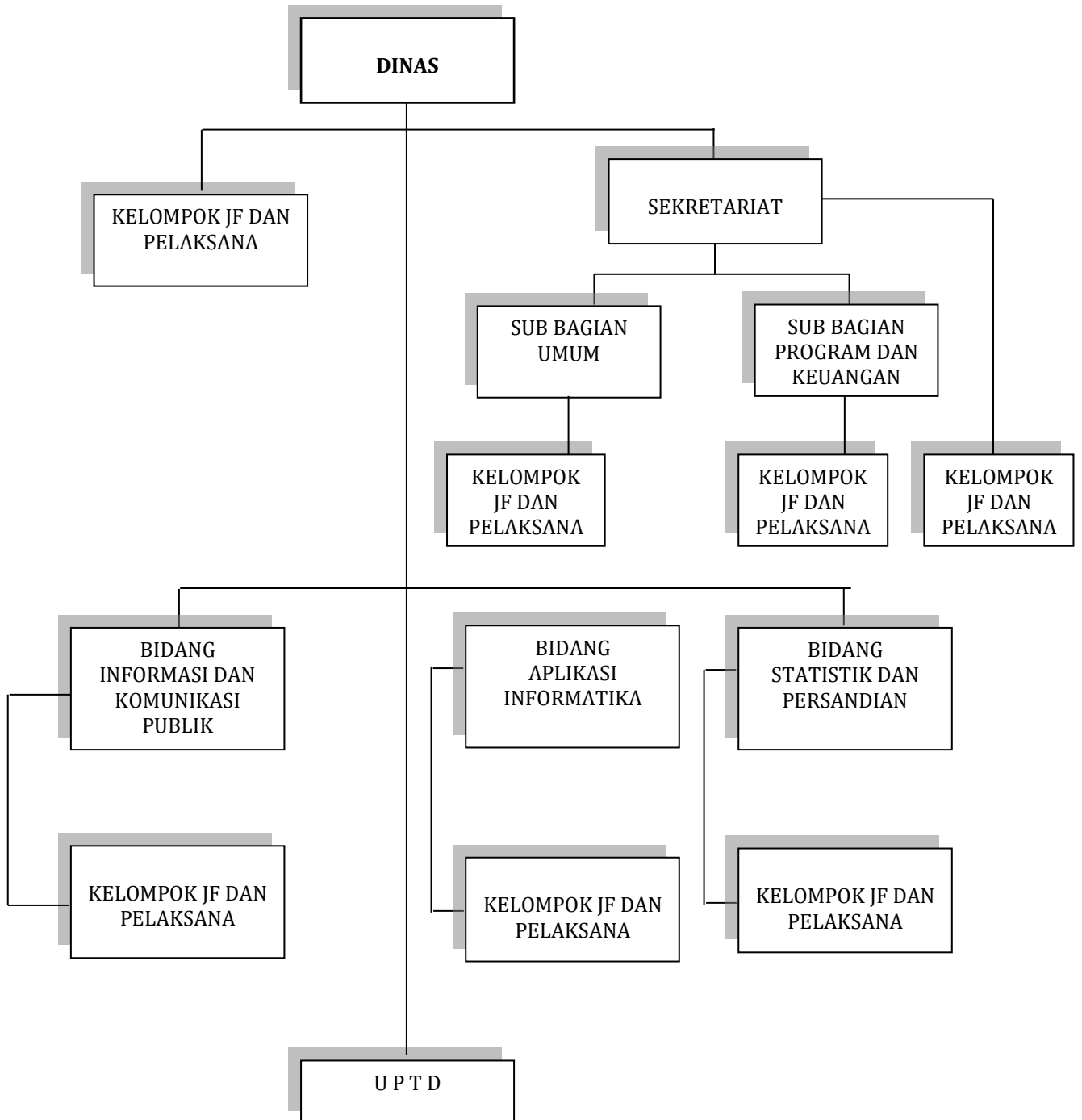
1. Mendorong Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang untuk dapat melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya secara baik dan benar, yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Kabupaten Sampang;
2. Menjadikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang yang akuntabel, sehingga dapat berperan secara efektif, efisien dan ekonomis serta responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan yang tentram, tertib, dan kondusif;
3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang guna membantu pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik;
4. Sebagai bahan evaluasi Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang, untuk kemudian diharapkan dapat memperbaiki kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang di masa yang akan datang.

#### **A. STRUKTUR ORGANISASI**

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 tahun 2020, tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Sampang Nomor 74 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sampang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang Komunikasi dan Informatika dan tugas pembantuan.



**STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN SAMPANG**



Untuk menjalankan tugas pokok Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang di dukung oleh Struktur Organisasi sebagai berikut :

**Tugas Pokok :** Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang Komunikasi dan Informatika dan tugas pembantuan.

**Fungsi :**

- a. Perumusan kebijakan bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sampang membagi secara terinci yang terdiri atas :

### **1. Kepala Dinas**

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Bupati, sedangkan pertanggungjawaban dalam bidang administrasi melalui Sekretaris Daerah.

### **2. Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, hubungan masyarakat, protokol dan keuangan serta mewakili Kepala Dinas dalam menjalankan urusan-urusan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas.

#### **Sekretariat Mempunyai Fungsi :**

- a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan sumber daya manusia;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan;

- d. Pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
- e. Pengelolaan administrasi perlengkapan;
- f. Pengelolaan surat menyurat, kearsipan dan perpustakaan;
- g. Pembinaan organisasi dan tatalaksana Dinas;
- h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana Dinas;
- i. Pelaksanaan koordinasi penyusunan perundang-undangan;
- j. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaannya;
- k. Pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yudisial);
- l. Pelaksanaan koordinasi perencanaan jaringan teknologi informasi dan pemeliharannya (“maintenance”);
- m. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

**Sekretariat Membawahi :**

- a. Sub Bagian Umum, mempunyai tugas :
  - a. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat, penggandaan naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan;
  - b. melaksanakan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
  - c. melaksanakan tugas bidang hubungan masyarakat;
  - d. menyusun perencanaan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
  - e. melaksanakan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan, perawatan perlengkapan kantor dan pengamanan;
  - f. membantu penyelesaian masalah hukum di luar pengadilan (non yudisial);
  - g. menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundang-undangan;
  - h. menyiapkan bahan perencanaan jaringan teknologi informasi dan pemeliharannya (“maintenance”); dan
  - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- b. Sub Bagian Program dan Keuangan, mempunyai tugas :
  - a. menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program;
  - b. melaksanakan pengolahan data;
  - c. melaksanakan perencanaan program;
  - d. menghimpun data, menyusun Rencana Strategis Dinas dan evaluasinya;
  - e. menghimpun data dan menyiapkan bahan penyusunan program anggaran, Rencana Kerja dan evaluasinya;

- f. menyiapkan bahan perencanaan sistem penganggaran dan kebijakan;
- g. menyiapkan bahan monitoring serta evaluasi organisasi dan pelaporan;
- h. menyusun Laporan Capaian Program Kegiatan;
- i. melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai;
- j. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan termasuk penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan;
- k. melaksanakan pengelolaan akuntansi keuangan;
- l. melaksanakan pengadministrasian dan penatausahaan keuangan;
- m. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

### **3. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik**

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas merencanakan, merumuskan, melaksanakan, kegiatan pengelolaan layanan informasi publik, pengelolaan opini publik, media publik serta kemitraan dan daya komunikasi publik. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan bidang informasi dan komunikasi publik;
- b. Perencanaan, perumusan, pelaksanaan kegiatan pengelolaan layanan Informasi Publik, pengelolaan opini publik, media publik serta kemitraan dan sumber daya komunikasi publik;
- c. Pelaksanaan kebijakan kerjasama antar lembaga komunikasi publik;
- d. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pengelolaan layanan informasi media publik dan opini publik;
- e. Pelaksanaan diseminasi informasi pembangunan nasional/daerah;
- f. Penyusunan petunjuk pelaksanaan kegiatan dalam penyelenggaraan pembinaan dan/atau penilaian kelompok informasi masyarakat;
- g. Penyusunan fasilitasi dan pemberdayaan kemitraan media local, media Pemerintah Daerah dan Non Pemerintah Daerah;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

### **4. Bidang Aplikasi Informatika**

Bidang Aplikasi Informatika mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Bidang Aplikasi Informatika. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Infrastruktur dasar *Data Center, Disaster Recovery Center* dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pemerintah Kabupaten Sampang;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Pengembangan Sistem Informasi Pemerintah Kabupaten Sampang;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Keamanan Sistem Informasi di Pemerintah Kabupaten Sampang;
- d. Pelaksanaan layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet;
- e. Penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan pemerintah;
- f. Penyelenggaraan sistem komunikasi dan jaringan intra pemerintah;
- g. Pengelolaan keamanan sistem informasi dan layanan *e-government*;
- h. Penatalaksanaan dan pengawasan *e-government* dalam penyelenggaraan pemerintah;
- i. Sinkronisasi pengelolaan rencana induk dan anggaran pemerintah berbasis elektronik;
- j. Pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintah berbasis elektronik;
- k. Penyelenggaraan sistem penghubung layanan pemerintah;
- l. Pengembangan dan pengelolaan ekosistem kabupaten/kota cerdas;
- m. Pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang;
- n. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Aplikasi Informatika di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang; dan
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## 5. Bidang Statistik dan Persandian

Bidang Statistik dan Persandian mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan Statistik, Persandian dan pelayanan informasi dan dokumentasi. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Statistik dan Persandian mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan, penyiapan bahan pelaksanaan dan pengkoordinasian statistik, persandian, dan keamanan informasi, dan pengelolaan data dan dokumentasi;
- b. Pelaksanaan Perumusan kebijakan urusan di bidang Statistik dan Persandian;
- c. Pelaksanaan Program dan Kegiatan di bidang statistik dan persandian;
- d. Pelaksanaan Koordinasi, sinkronisasi, dan Fasilitasi di Bidang Statistik dan Persandian;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan Pelaporan di bidang Statistik dan Persandian; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## **6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)**

- a. Adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
- b. Dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- c. Pembentukan UPTD dapat dilakukan dengan mempertimbangkan peningkatan pelayanan dan beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **7. Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing – masing berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

## **B. ISU STRATEGIS**

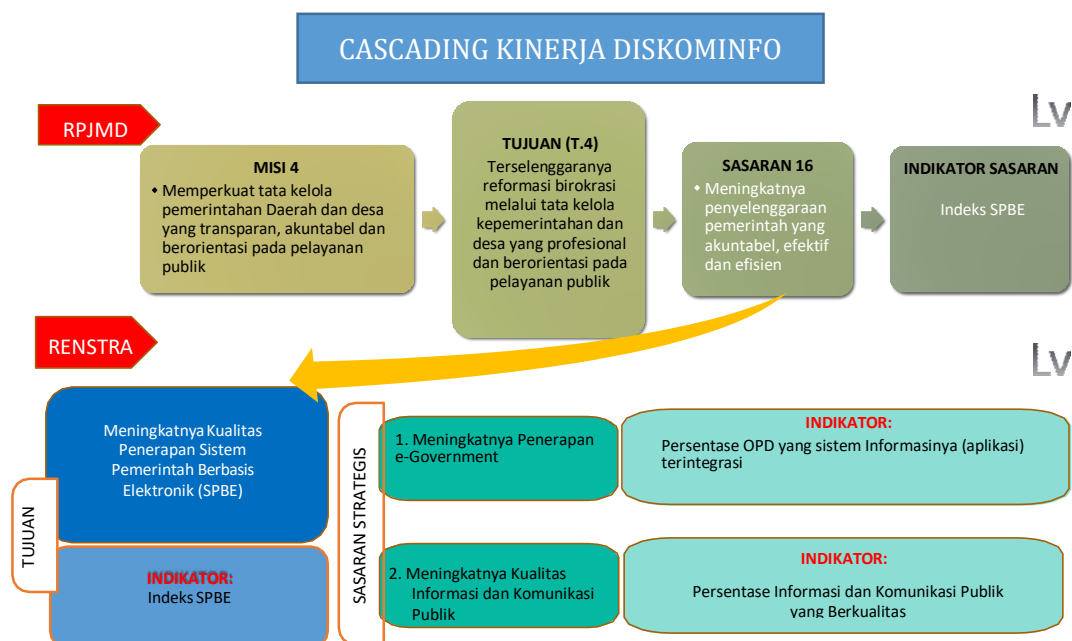
Hasil analisa isu strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang seperti yang tertuang didalam dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang Tahun 2020-2024 yang membutuhkan pemecahan dan penanganan segera di lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang diantaranya :

- a. Penyediaan infrastruktur (Akses internet) belum menjangkau semua Perangkat Daerah (belum sampai tingkat kecamatan dan desa);
- b. Konsistensi Perangkat Daerah untuk mengisi konten website, sehingga website terupdate secara berkala;
- c. Belum Optimalnya Pengelolaan dan Pengembangan Database, sehingga implementasi elektronik e-government belum sepenuhnya didukung oleh ketersediaan data yang cepat, tepat dan akurat; dan
- d. Pelayanan Publik dan media informasi belum sepenuhnya berbasis TIK.

## **C. CASCADING KINERJA**

Berdasarkan Struktur Organisasi Diskominfo Kab. Sampang selanjutnya dijabarkan kedalam Cascading yang merupakan dokumen pernyataan proses penjabaran, penyelarasan dan penurunan kinerja secara bertahap secara vertikal dari level yang lebih tinggi ke level yang lebih rendah untuk mewujudkan target yg ingin dicapai dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yg telah ditetapkan dalam Renstra dan dijadikan acuan dalam penyusunan perjanjian kinerja.

**Gambar 1.1.**  
**Cascading Kinerja Diskominfo**



#### D. ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH

Dalam Pelayanan Komunikasi dan Informatika sebagai Tupoksi Dinas saat ini telah memasuki era reformasi. Masyarakat menuntut adanya keterbukaan informasi, khususnya yang menyangkut program pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Kepala Daerah diamanatkan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya guna terlaksananya pengembangan pembangunan e-Government. Tantangan utama pengembangan e-Government adalah kemampuan dan kesiapan manajemen serta para pelakunya. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah Infrastruktur komunikasi data dan informasi infrastruktur sistem aplikasi, standarisasi meta data, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan prosedur, kebijakan dan peraturan.

Sehubungan dengan pengembangan e-government langkah awal yang dilaksanakan adalah memfasilitasi akses informasi elektronik berupa website pemerintah daerah. Saat ini website Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang sudah dapat digunakan dan diakses oleh pengguna yang manfaatnya masih belum dapat dirasakan secara signifikan. Berbagai konten dan design tiap saat tentu memerlukan pembaharuan sehingga kandungan berita di dalamnya tetap ter-update. Masyarakat

sudah dapat memanfaatkan website Pemerintah Kabupaten Sampang saat ini dengan alamat [www.sampangkab.go.id](http://www.sampangkab.go.id).

Berdasarkan kebutuhan informasi dan komunikasi berbasis elektronik kiranya berbagai hambatan yang timbul antaranya adalah konsistensi perhatian terhadap sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana sangat dibutuhkan untuk mendukung pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi.

Berdasarkan hal tersebut diatas, telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (*gap*) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah. Seperti pada tabel berikut ini:



**Tabel 1.1**  
**Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Perangkat Daerah**

No.	Masalah	Pokok Masalah	Akar Masalah
1.	Persentase Website Organisasi Perangkat Daerah yang aktif yang memenuhi standar TI sudah tercapai 100% namun dalam mempertahankan kualitas capaian tersebut terdapat beberapa kendala	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan infrastruktur (Akses internet) belum menjangkau semua PD</li> <li>2. konsistensi Perangkat Daerah untuk mengisi konten website</li> <li>3. Belum Optimalnya Pengelolaan dan Pengembangan Database, sehingga implementasi elektronik e-government belum sepenuhnya didukung oleh ketersediaan data yang cepat, tepat dan akurat</li> </ol>	<p><b>Faktor Internal:</b> Keterbatasan anggaran dan SDM yang berbasis TIK di Diskominfo</p> <p><b>Faktor Eksternal:</b> Kurangnya dukungan Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan website OPD yang memenuhi standar konten dan integrasi data</p>
2.	Persentase Permohonan ke PPID yang ditindaklanjuti sudah tercapai 100% namun dalam pelayanan PPID masih konvensional belum berbasis TIK	Pelayanan PPID belum berbasis TIK	<p><b>Faktor Internal:</b> Belum direncanakan pengembangan pelayanan PPID berbasis TIK</p> <p><b>Faktor Eksternal:</b> Kurangnya dukungan Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi public yang berbasis TIK</p>
3.	Persentase OPD/ Lembaga yang menerima penyebarluasan media informasi sudah tercapai 100% namun media informasi belum berbasis TIK	Media informasi belum berbasis TIK	<p><b>Faktor Internal:</b> Belum direncanakan pengembangan media informasi berbasis TIK</p> <p><b>Faktor Eksternal:</b> Kurangnya kesadaran Perangkat Daerah dalam memanfaatkan TIK</p>
4.	Persentase KIM berbasis TIK sudah tercapai 70% namun website belum sepenuhnya aktif	Website sebagai media informasi KIM belum optimal	<p><b>Faktor Internal:</b> Belum memanfaatkan secara optimal potensi komunikasi yang ada di masyarakat</p> <p><b>Faktor Eksternal:</b> Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan TIK</p>
5.	Persentase data statistik di publikasikan dan tepat waktu sudah mencapai 100% namun dalam publikasi data statistic belum berbasis TIK	Publikasi data statistic belum berbasis TIK	<p><b>Faktor Internal:</b> Keterbatasan SDM yang berbasis TIK</p> <p><b>Faktor Eksternal:</b> Data sektoral di Perangkat Daerah belum berbasis TIK</p>

Sumber : P-Renstra Diskominfo, 2022

#### E. PETA PROSES BISNIS

Dokumen Cascading selanjutnya dibandingkan dengan peta proses bisnis yang merupakan diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien

*LKjIP Diskominfo Kabupaten Sampang Tahun 2023*

antar unit organisasi/level untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

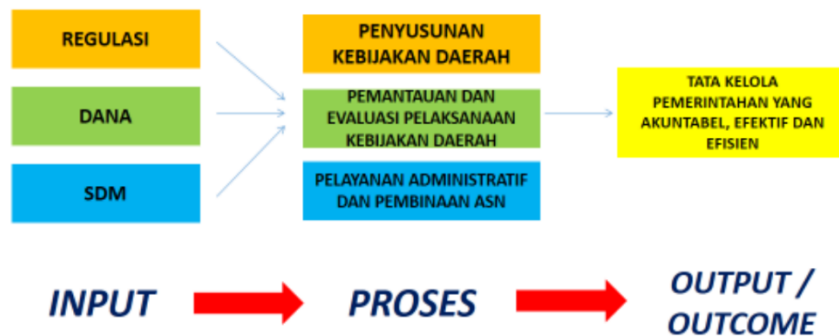
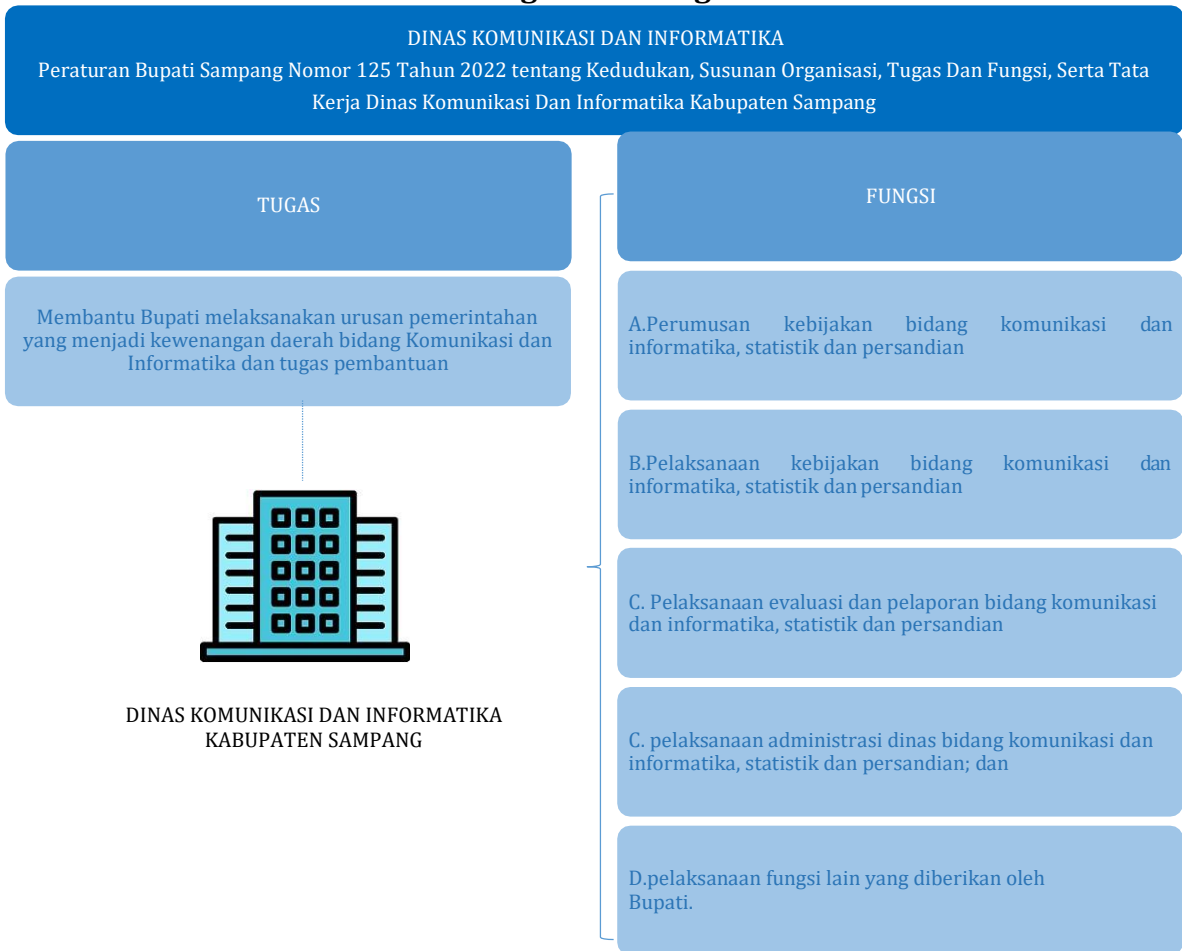
Penyusunan peta proses bisnis menjadi salah satu faktor suksesnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di instansi pemerintah. Penyusunan peta proses bisnis merupakan bagian dari penataan tata laksana yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada masing-masing instansi pemerintah.

Jika poses bisnis yang berbelit-belit dan tumpang-tindih antara satu unit organisasi dengan unit organisasi yang lain akan membuat organisasi menjadi lambat untuk bekerja. Oleh karena itu, setiap unit organisasi memerlukan peta proses bisnis yang mampu menggambarkan proses bisnis yang dilakukan oleh organisasi dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi. Peta proses bisnis sendiri merupakan aset terpenting organisasi yang mengumpulkan seluruh informasi ke dalam satu kesatuan dokumen atau database organisasi. Dengan demikian, menjadi sebuah keniscayaan untuk melibatkan seluruh elemen organisasi dalam penyusunan peta proses bisnis untuk memastikan akurasi dan kelengkapan dari proses bisnis yang digambarkan sesuai dengan rencana strategis organisasi.

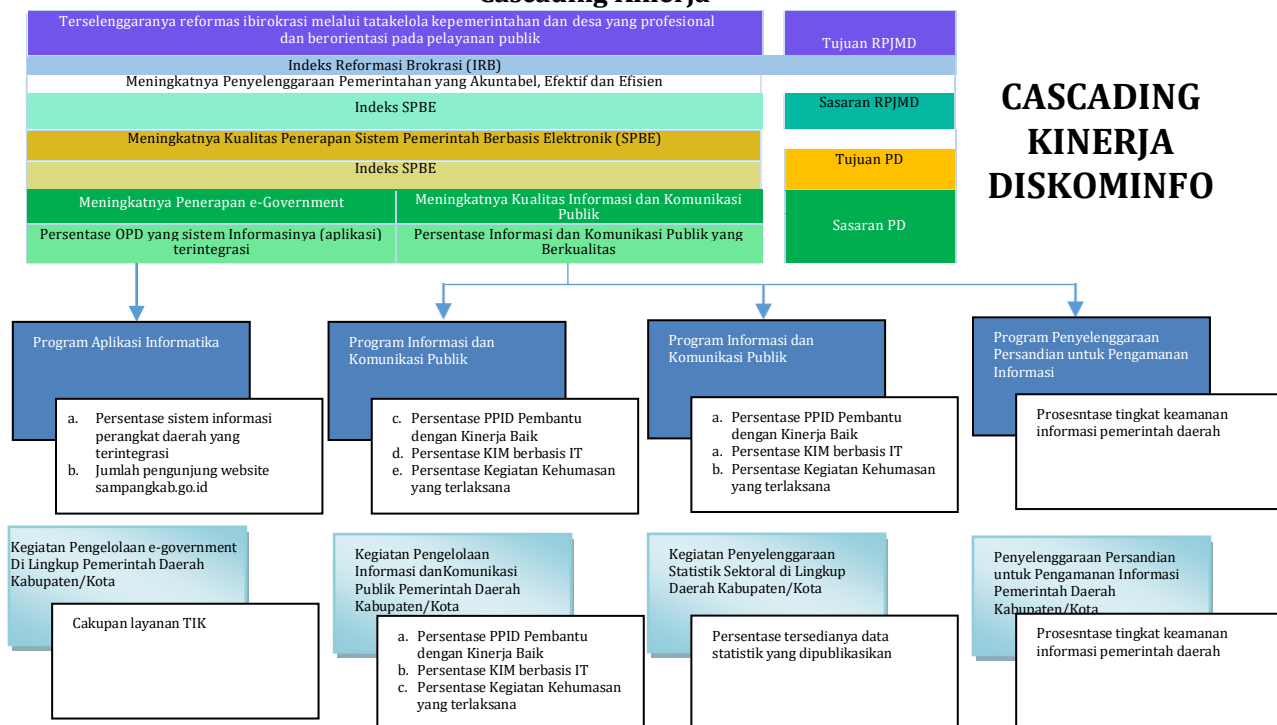
Tujuan penyusunan peta proses bisnis adalah untuk menjadi dasar pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan organisasi dan sumber daya manusia, serta penilaian kinerja. Peta proses bisnis bermanfaat untuk melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah, serta memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan.

Berikut Peta Proses Bisnis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang :

**Gambar 1.2.**  
**Tugas dan Fungsi**



**Gambar 1.4.**  
**Cascading Kinerja**



**Gambar 1.5.**  
**INTI PROSES BISNIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**



Gambar 1.6. Perbandingan Proses Bisnis Dan Struktur Organisasi

PROSES BISNIS

RELEVAN

STRUKTUR ORGANISASI

# Peningkatan Kualitas Penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)

## Peningkatan Penerapan e-Government

## Peningkatan Kualitas Informasi dan Komunikasi Publik

Pengelolaan aplikasi informatika

Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Pengelolaan Informasidan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah

Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas

Pengelolaan Media Komunikasi Publik

Pelayanan Informasi Publik

Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral

Membangun Metadata Statistik Sektoral

Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabup

Program aplikasi informatika

Program Informasi dan Komunikasi Publik

Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah

Sub kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas

Sub kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik

Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik

Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik

Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral

Sub kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral

Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Sekretarat Diskominfo

Bidang Aplikasi Informatika

Bidang infomarmasi dan Komunikasi Publik

Bidang Statistik dan Persandian

**F. REALISASI ANGGARAN**

**Gambar 1.7.**  
**REALISASI ANGGARAN BAGIAN PER 31 DESEMBER 2023**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**KABUPATEN SAMPANG**

NO	URAIAN	ALOKASI BIAYA		
		ANGGARAN	REALISASI	%
<b>A</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>9,997,556,292</b>	<b>9,772,678,566</b>	<b>97.75</b>
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	<b>9,850,173,849</b>	<b>9,626,384,404</b>	<b>97.73</b>
a	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3,971,061,960</b>	<b>3,775,812,083</b>	<b>95.08</b>
1)	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>10,997,862</b>	<b>10,979,850</b>	<b>99.84</b>
a)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1,999,862	1,999,850.00	100.00
b)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1,999,862	1,999,000.00	99.96
c)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	999,653	998,500.00	99.88
d)	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	1,999,862	1,999,000.00	99.96
e)	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	999,928	999,500.00	99.96
f)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2,998,695	2,984,000.00	99.51
2)	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2,837,315,856</b>	<b>2,642,901,080.00</b>	<b>93.15</b>
a)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,835,316,491	2,640,905,080.00	93.14
b)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	999,626	998,000.00	99.84
c)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	999,739	998,000.00	99.83
4)	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>50,296,500</b>	<b>50,220,000</b>	<b>99.85</b>
a)	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	50,296,500	50,220,000.00	99.85
5)	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>441,299,414</b>	<b>440,813,109</b>	<b>99.89</b>
a)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	27,906,696	27,905,000.00	99.99

NO	URAIAN	ALOKASI BIAYA		
		ANGGARAN	REALISASI	%
	Kantor			
b)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	81,761,305	81,753,000.00	99.99
c)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	54,155,688	54,124,000.00	99.94
d)	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	38,740,725	38,563,523.00	99.54
e)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6,300,000	6,300,000.00	100.00
f)	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10,920,000	10,920,000.00	100.00
g)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	221,515,000	221,247,586.00	99.88
<b>5)</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>41,152,978</b>	<b>41,149,365</b>	<b>99.99</b>
a)	Pengadaan Mebel	5,583,208	5,581,080.00	99.96
b)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35,569,770	35,568,285.00	100.00
<b>6)</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>342,789,350</b>	<b>342,729,415</b>	<b>99.98</b>
a)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	273,789,350	273,729,415.00	99.98
b)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	69,000,000	69,000,000.00	100.00
<b>7)</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>247,210,000</b>	<b>247,019,264</b>	<b>99.92</b>
a)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	76,800,000	76,784,000.00	99.98
b)	Pemeliharaan Mebel	4,960,000	4,960,000.00	100.00
c)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37,050,000	37,050,000.00	100.00
d)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	128,400,000	128,225,264.00	99.86
<b>b</b>	<b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>850,107,352</b>	<b>830,796,892</b>	<b>97.73</b>
<b>1)</b>	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>850,107,352</b>	<b>830,796,892</b>	<b>97.73</b>
a)	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	812,141,958	805,765,618.00	99.21
b)	Pelayanan Informasi Publik	27,665,394	14,757,674.00	53.34
c)	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	10,300,000	10,273,600.00	99.74

NO	URAIAN	ALOKASI BIAYA		
		ANGGARAN	REALISASI	%
<b>c</b>	<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>5,029,004,537</b>	<b>5,019,775,429</b>	<b>99.82</b>
<b>1)</b>	<b>Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>5,029,004,537</b>	<b>5,019,775,429</b>	<b>99.82</b>
a)	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	445,807,155	444,846,661.00	99.78
b)	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten / Kota Cerdas dan Kota Cerdas	4,583,197,382	4,574,928,768.00	99.82
<b>2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>	<b>107,430,030</b>	<b>106,835,000.00</b>	<b>99.45</b>
<b>a</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	<b>107,430,030</b>	<b>106,835,000</b>	<b>99.45</b>
<b>1)</b>	<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>107,430,030</b>	<b>106,835,000</b>	<b>99.45</b>
a)	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	61,872,980	61,345,000.00	99.15
b)	Membangun Metadata Statistik Sektoral	45,557,050	45,490,000.00	99.85
<b>3</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>	<b>39,952,413</b>	<b>39,459,162</b>	<b>98.77</b>
<b>a</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	<b>39,952,413</b>	<b>39,459,162</b>	<b>98.77</b>
<b>1)</b>	<b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>39,952,413</b>	<b>39,459,162</b>	<b>98.77</b>
a)	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	39,952,413	39,459,162.00	98.77

Sumber : LKPJ Bupati Diskominfo Kabupaten Sampang, 2023



## **1.7. Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi (LHE)**

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Diskominfo Kabupaten Sampang Tahun 2023 atas Implementasi SAKIP Diskominfo Kabupaten Sampang tahun 2022 ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

### **a. Pengukuran Kinerja**

#### **1) Kualitas Pengukuran**

Pengukuran data kinerja dan capaian kinerja belum dikembangkan dengan menggunakan teknologi informasi

#### **2) Implementasi Pengukuran**

Pengukuran Kinerja belum menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja /penghasilan;

### **b. Pelaporan Kinerja**

Informasi dalam laporan kinerja belum mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi

### **c. Evaluasi Internal**

Pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja kurang maksimal sehingga implementasi SAKIP kurang optimal

## BAB II

# PERENCANAAN KINERJA

### A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2019-2024

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024, yang mengacu pada *Visi Bupati Sampang* yaitu **“SAMPANG HEBAT BERMARTABAT”** dimana Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sampang mendukung pada *Misi 4* yaitu **“Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik”** serta mendukung pada pencapaian *tujuan* dari Misi 4 ini adalah **“Terselenggaranya reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan dan desa yang professional dan berorientasi pada pelayanan publik”** dengan salah satu *sasarannya* adalah **“Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien”**.

Dengan hal tersebut selanjutnya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang menyusun rencana strategis yang *bertujuan* untuk **“Meningkatnya Kualitas Penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)”** dengan *indikator* **“Indeks SPBE”**. Dari tujuan rencana strategis dimaksud Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang memiliki 2 (dua) sasaran yaitu :

1. Meningkatkan Penerapan e-Government.

Indikator : Persentase OPD yang sistem Informasinya (aplikasi) terintegrasi

2. Meningkatkan Kualitas Informasi dan Komunikasi Publik.

Indikator : Persentase Informasi dan Komunikasi Publik yang Berkualitas

Adapun tujuan dan sasaran yang tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

**Tabel. 2.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah**  
**Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024**

NO.	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	Kondisi Awal Renstra (2018)	TARGET						Kondisi Akhir Renstra (2024)
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Tujuan :</b>										
	Meningkatnya Kualitas Penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks SPBE	1.5	1.81	1.81	2.98	2.61	3.01	3.41	<b>3.41</b>
<b>Sasaran :</b>										
1	Meningkatnya Penerapan e-Government	Persentase OPD yang sistem Informasinya (aplikasi) terintegrasi	54%	36.84%	47%	47.4%	50%	65%	80%	<b>80%</b>
2	Meningkatnya Kualitas Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Informasi dan Komunikasi Publik yang Berkualitas	48.38%	51.61%	54.84%	56.45%	60%	80%	85%	<b>85%</b>

*Sumber : Penajaman Renstra Diskominfo, 2022*

## B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dengan demikian Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang Tahun 2023 pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu 1 (satu) tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelolanya. Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2023 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang seperti pada Tabel dibawah ini :

**Tabel 2.2**  
**Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi Dan Informatika**  
**Kabupaten Sampang Tahun 2023**

No.	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penanggung Jawab
Tujuan				
1	Meningkatnya Kualitas Penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks SPBE	3.57	Bidang Aptika
Sasaran				
1.	Meningkatnya Penerapan e-Government	Persentase OPD yang sistem Informasinya (aplikasi) terintegrasi	65%	Bidang Aptika
2.	Meningkatnya Kualitas Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Informasi dan Komunikasi Publik yang Berkualitas	80%	Bidang IKP dan Bidang Statistik dan Persandian

Sumber : Diskominfo Kabupaten Sampang, 2023

Berdasar pada tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang mempunyai 2 ( dua ) sasaran strategis yang merupakan tujuan utama dengan masing-masing memiliki target capaian, Untuk mencapai target tersebut, maka Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sampang harus mampu mengoptimalkan kegiatan-kegiatan utama yang telah direncanakan dan disusun pada Tahun 2023 ini dengan berbagai macam inovasi dan terobosan-terobosan baru yang mendukung serta melaksanakan kegiatan-kegiatan pendukung baik dari sisi infrastruktur maupun sisi koordinasi yang mendukung tercapainya tujuan dari kegiatan utama.

Perjanjian Kinerja inilah yang menjadi dasar penyusunan perjanjian kinerja seluruh pegawai di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang, mulai dari level pejabat tertinggi (eselon II) sampai ke pelaksana berdasarkan tugas dan fungsi serta hasil turunan (cascading) dari perjanjian kinerja atasannya.

Untuk mewujudkan kinerja tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang mendapat dukungan anggaran dari APBD sebesar Rp9,997,556,292.00 yang digunakan untuk melaksanakan 11 kegiatan yang terangkum dalam 5 pogram sebagai berikut :

**Tabel 2.3**  
**Anggaran Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sampang Tahun 2023**

<b>NO.</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN (Rp)</b>
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	3,971,061,960.00
2.	Program Informasi dan Komunikasi Publik	850,107,352.00
3.	Program Aplikasi Informatika	5,029,004,537.00
4.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	107,430,030.00
5.	Program Peyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	39,952,413.00
	<b>Jumlah</b>	<b>9,997,556,292.00</b>

*Sumber : Diskominfo Kabupaten Sampang, 2023*

Jumlah anggaran tersebut selanjutnya digunakan untuk mendukung terwujudnya 2 sasaran strategis Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sampang tahun 2023 dengan alokasi sebagai berikut :

**Tabel 2.4.**  
**Alokasi Anggaran per Sasaran Strategis**

<b>NO.</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>ANGGARAN (Rp)</b>
1	Meningkatnya Penerapan e-Government	9,000,066,497.00
2	Meningkatnya Kualitas Informasi dan Komunikasi Publik	997,489,795.00
	<b>Jumlah</b>	<b>9,997,556,292.00</b>

*Sumber : Diskominfo Kabupaten Sampang, 2023*

## **BAB III**

# **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas Kinerja sebagai suatu media pertanggungjawaban dari suatu instansi pemerintah yang mencerminkan kewajiban untuk memberikan laporan pertanggungjawaban dan sekaligus mencerminkan kewajiban untuk menjawab mengenai hal-hal yang memerlukan jawaban. Dalam penjabaran akuntabilitas tersebut, perlu dilakukan pengukuran kinerja terhadap komponen-komponen penting yang dapat menggambarkan tingkat keberhasilan maupun hambatan yang dialami selama suatu periode tertentu. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang.

### **A. CAPAIAN KINERJA**

Sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja, LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 memiliki fokus utama membahas tentang pencapaian hasil-hasil dari pelaksanaan program kerja di Tahun 2023 berdasarkan masing- masing indikator kinerja dari sasaran-sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang.

Agar mencapai hasil maka pengukuran kinerja ini digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program atau kegiatan pada Tahun 2023 sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang.

Dalam kerangka pengukuran kinerja terdapat tahapan penetapan, pengumpulan data, dan cara pengukuran kinerja. Penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi dan klasifikasi indikator kinerja melalui sistem pengumpulan dan pengolahan data/informasi untuk menentukan kinerja kegiatan, program dan kebijakan. Penetapan

indikator kinerja tersebut didasarkan pada kelompok menurut masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*), dan dampak (*impacts*). Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan.

Adapun pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih kinerja (*performance gap*), yang selanjutnya berdasarkan selisih tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*).

Adapun target dan capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Target dan Pencapaian Kinerja**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang Tahun 2023**

No.	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
<b>TUJUAN</b>					
1.	Meningkatnya Kualitas Penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks SPBE	3.01	3.57	118.60%
<b>SASARAN</b>					
1.	Meningkatnya Penerapan e-Government	Persentase OPD yang sistem Informasinya (aplikasi) terintegrasi	65%	71.43%	109.89%
2.	Meningkatnya Kualitas Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Informasi dan Komunikasi Publik yang Berkualitas	80%	73.75%	92.19%

Sumber : Diskominfo Kabupaten Sampang, 2023

## **B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA**

Masing – masing sasaran, ditetapkan indikator kinerja sebagai parameter pencapaian, dapat dijelaskan aspek keberhasilan pencapaian sasaran sebagai berikut :

**Tujuan** : *Meningkatnya Kualitas Penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)*

**Indikator** : *Indeks SPBE*

**Tabel 3.2.  
Pencapaian Kinerja Tujuan**

No.	TUJUAN	INDIKATOR	REALISASI TAHUN 2022	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Kualitas Penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks SPBE	2.55	3.01	3.57	118.60%

Sumber : Diskominfo Kabupaten Sampang, 2023

Dari hasil evaluasi pengukuran kinerja terhadap Tujuan diperoleh gambaran bahwa Indikator yang ditetapkan menghasilkan angka capaian kinerja 118.60%. Adapun Secara umum kegiatan dapat terlaksana dengan baik, dengan uraian sebagai berikut :

1. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan yaitu :

Penerapan SPBE dinilai dengan metode tingkat kematangan SPBE yang merupakan kerangka kerja untuk mengukur derajat kematangan penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkat kematangan SPBE terdiri atas 5 (lima) level, dimana masing-masing level menunjukkan karakteristik kematangan tertentu pada kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE.

Perolehan nilai tingkat kematangan terdiri dari 47 indikator. Berikut merupakan perbandingan kematangan indikator di tahun 2023 dan di tahun 2022.

**Tabel 3.3.  
Indikator Kematangan SPBE**

No	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan 2023	Nilai Tingkat Kematangan 2022
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	5	3
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	5	3
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	5	3
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	5	3




No	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan 2023	Nilai Tingkat Kematangan 2022
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	5	3
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi	5	3
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan	5	3
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	5	3
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	5	3
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	3	3
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3	1
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	3	2
13	Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE	1	1
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	3	1
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	2	1
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	4	2
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah	4	3
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi	4	2
19	Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	4	2
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	5	2
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	1	1
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	1	1
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	1	1
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	1	1
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	2	1
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	2	1
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	1	1
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	2	1
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	2	1
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	2	1
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	1	1
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	4	4
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	4	4
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	4	3

No	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan 2023	Nilai Tingkat Kematangan 2022
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	4	4
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	4	3
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	4	2
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara /	3	2
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	4	3
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	4	4
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	4	3
42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	5	4
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	3	3
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	4	4
45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	5	4
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	5	4
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	4	4

Sumber : Laporan Hasil Evaluasi SPBE dari Kemenpan RB, 2023

Keterangan :

 : stagnan

 : mengalami peningkatan

Dari data di atas, sebanyak 15 indikator dari 47 indikator atau sekitar 31,91% indikator memiliki nilai yang sama antara tahun 2022 dan tahun 2023. Lalu sebanyak 32 indikator dari 47 indikator atau sekitar 68,09% mengalami peningkatan.

Melihat sebagian besar indikator mengalami peningkatan dan tidak ada indikator yang mengalami penurunan, hal ini menjadi penyebab naiknya indeks SPBE. Walaupun demikian, masih banyak hal yang perlu dievaluasi agar indeks SPBE bisa tetap mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

2. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya :

Dinas Komunikasi dan Informatika dengan SDM yang terbatas dapat memaksimalkan SDM yang ada.

3. Program yang mendukung keberhasilan dari pencapaian target untuk indikator ini adalah :

Program Aplikasi infomatika dengan penambahan jaringan setiap tahunnya, pemeliharaan website, pengamanan aplikasi untuk website, serta

koordinasi secara berkesinambungan dengan OPD di Kabupaten Sampang.

**Sasaran 1: Meningkatnya Penerapan e-Government**

**Indikator: Persentase OPD yang sistem Informasinya (aplikasi) terintegrasi.**

**Tabel 3.3**  
**Pencapaian Kinerja Sasaran 1**

No.	SASARAN 1	INDIKATOR SASARAN	REALISASI TAHUN 2022	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Penerapan e-Government	Persentase OPD yang sistem Informasinya (aplikasi) terintegrasi	48,28%	65%	71.43%	109.89%

Sumber: Diskominfo Kabupaten Sampang, 2023

Dari hasil evaluasi pengukuran kinerja terhadap Sasaran Strategis 1 diperoleh gambaran bahwa Indikator yang ditetapkan menghasilkan angka capaian kinerja 109,89%. Adapun Secara umum kegiatan dapat terlaksana dengan baik, dengan uraian sebagai berikut :

1. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan yaitu :

- a. Pada Program aplikasi informatika, semua OPD (Dinas/Badan dan Kecamatan) Sudah terkoneksi 100%. Kendala saat ini masih ada trouble dari Internet Service Provider, sering terjadi pemadaman listrik di kawasan Diskominfo sehingga tidak jarang menyebabkan kinerja server tidak optimal, putusnya kabel Fiber Optik. Sering trouble perangkat wireless di setiap OPD mengalami penurunan kinerja dikarenakan faktor usia dan penurunan performa perangkat wireless.

Selain itu, Perbedaan format dan struktur data antar sistem informasi yang mengakibatkan inkonsistensi data antar sistem aplikasi, hal ini menyebabkan kesalahan atau interpretasi yang salah. Sistem yang tidak dirancang dari awal untuk bekerja bersama dapat mengalami kesulitan dalam berinteraksi dan berbagi informasi.

Alternatif solusi yang digunakan adalah dengan memaksimalkan perangkat jaringan yang ada dengan melakukan perbaikan secara berkala sehingga tidak mengurangi fungsi dari peralatan tersebut, melakukan upgrade

server, melakukan pembagian bandwidth tiap OPD secara proporsional sesuai dengan kebutuhan OPD, memaksimalkan SDM yang ada untuk menangani permasalahan terkait jaringan dan website.

Selain itu, alternatif solusi lainnya adalah pentingnya pendekatan top-down dalam pengembangan aplikasi pemerintahan menekankan perlunya penetapan kebijakan pembuatan aplikasi sebelumnya. Dengan demikian, setiap aplikasi yang dikembangkan dapat diarahkan secara konsisten sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan, memastikan distribusi dan implementasi yang merata di seluruh lembaga pemerintahan. Penyederhanaan proyek integrasi yang kompleks diperlukan untuk mengurangi resiko dan meningkatkan efisiensi aplikasi.

- b. Pada kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabup untuk aspek kebijakan dan tata kelola sudah baik, sedangkan untuk aspek layanan belum sepenuhnya layanan publik terintegrasi. Alternatif solusi yang digunakan adalah dengan meningkatkan koordinasi untuk mengintegrasikan layanan publik yang ada. Serta pentingnya kesadaran dari stake holder (seperti OPD) akan pentingnya melakukan integrasi sistem informasi.

2. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya :

- a. Dinas Komunikasi dan Informatika dengan SDM yang terbatas dapat memaksimalkan SDM yang ada

3. Program yang mendukung keberhasilan dari pencapaian target untuk indikator ini adalah :

- a. Program Aplikasi Informatika dengan penambahan jaringan setiap tahunnya, pemeliharaan website, pengamanan aplikasi untuk website, pengamanan aplikasi, serta koordinasi yang berkesinambungan dengan OPD di Kabupaten Sampang. Serta pentingnya kesadaran dari stake holder (seperti OPD) akan pentingnya melakukan integrasi sistem informasi.

**Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Informasi dan Komunikasi Publik**

**Indikator: Persentase Informasi dan Komunikasi Publik yang Berkualitas.**

**Tabel 3.4.**  
**Pencapaian Kinerja Sasaran 2**

No.	SASARAN 2	INDIKATOR SASARAN	REALISASI TAHUN 2022	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Kualitas Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Informasi dan Komunikasi Publik yang Berkualitas	78,22%	80%	73.75%	92.19%

Sumber : Diskominfo Kabupaten Sampang, 2023

Dari hasil evaluasi pengukuran kinerja terhadap Sasaran Strategis 2 diperoleh gambaran bahwa Indikator Sasaran yang ditetapkan menghasilkan angka capaian kinerja 92,18%. Adapun Secara umum kegiatan dapat terlaksana dengan baik, dengan uraian sebagai berikut :

1. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan yaitu :

1. Pada program informasi dan komunikasi publik masih ada OPD yang belum memahami mekanisme pelayanan informasi publik, Kurangnya Sarana dan prasarana serta kemampuan anggota Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dalam rangka menyebarkan informasi pembangunan kepada masyarakat di lingkungannya. Walaupun demikian, pada program ini terdapat kegiatan ADV terkait kegiatan bupati yang sangat mendongkrak capaian nilai pada sasaran 2 ini.

Alternatif solusi yang digunakan adalah dengan meningkatkan kapasitas OPD dalam memahami mekanisme pelayanan informasi publik serta meningkatkan kapasitas anggota KIM.

2. Pada Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, semua dokumen statistik daerah dapat terpenuhi antara lain : Kabupaten dalam angka, Kecamatan dalam angka, Tinjauan Ekonomi dan PDRB. Penyusunan data statistik masih bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Sampang, sehingga pelaksanaan kegiatan penyusunan data statistik menunggu kesiapan Badan Pusat Statistik Kabupaten Sampang.

Walaupun demikian, masih terdapat beberapa kendala seperti Masih sulitnya meminta data 32ystem32l32 dalam 32ystem32l32an yang

tersedia di masing-masing OPD.

Alternatif solusi yang digunakan adalah dengan perlu adanya peran serta Kepala OPD dan Forum Sampang Satu Data untuk pemenuhan data statistik OPD

3. Pada Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi masih terdapat kendala seperti masih belum optimalnya 33system33 keamanan informasi pada Perangkat Daerah.

Alternatif Solusi yang digunakan adalah Semua Perangkat Daerah menggunakan email pada sampangkab.go.id dan aplikasi yang dibangun sudah menggunakan 33system33l SSL

2. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya :

Sumber daya manusia yang terbatas di Bidang Statistik dan Persandian sehingga menggunakan staf di bidang lain. Namun untuk bidang IKP sudah memaksimalkan SDM yang ada.

3. Program yang mendukung keberhasilan dari pencapaian target untuk indikator ini adalah :
  - a. Program Informasi Dan Komunikasi Publik;
  - b. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral; dan
  - c. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi.

Jika realisasi kinerja tahun 2023 dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya (4 tahun sebelumnya 2019-2022), maka dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.5**  
**Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan**  
**Tahun- Tahun Sebelumnya**

NO.	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2022	REALISASI				
				2019	2020	2021	2022	2023
<b>Tujuan :</b>								
1	Meningkatnya Kualitas Penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks SPBE	2,61	1,81	1,81	2.98	2.55	3.57
<b>Sasaran :</b>								
1	Meningkatnya Penerapan e-Government	Persentase OPD yang 33system Informasinya (aplikasi) terintegrasi	50%	36.84%	47%	47.4%	48.28%	71.43%
2	Meningkatnya Kualitas Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Informasi dan Komunikasi Publik yang Berkualitas	60%	51.61%	54.84%	56.45%	78.22%	73.75%

Sumber : Diskominfo Kabupaten Sampang, 2023

Jika realisasi kinerja tahun 2023 dibandingkan dengan target akhir Renstra (Tahun 2024), maka dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.6.**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode Rentra**

NO.	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA (TAHUN 2024)	REALISASI 2023	TINGKAT KEMAJUAN
<b>Tujuan :</b>					
1	Meningkatnya Kualitas Penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks SPBE	3.41	3.57	104.70%
<b>Sasaran :</b>					
1	Meningkatnya Penerapan e-Government	Persentase OPD yang sistem Informasinya	80%	71.43%	89.29%

NO.	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA (TAHUN 2024)	REALISASI 2023	TINGKAT KEMAJUAN
		(aplikasi) terintegrasi			
2	Meningkatnya Kualitas Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Informasi dan Komunikasi Publik yang Berkualitas	85%	73.75%	86.76%

Sumber : Diskominfo Kabupaten Sampang, 2023

Dari Tabel 3.11 di atas dapat dijelaskan untuk tingkat kemajuan dari akhir Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang 2019-2024 dapat diperoleh hasil rata-rata baik.

Jika realisasi kinerja tahun 2023 dibandingkan dengan realisasi kinerja level nasional (*benchmark* kinerja), maka dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.7.**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Nasional**

NO.	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	REALISASI 2023	REALISASI NASIONAL	KET
	<b>Tujuan :</b>				
1	Meningkatnya Kualitas Penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks SPBE	2.55	-	Tidak tersedia data
	<b>Sasaran :</b>				
1	Meningkatnya Penerapan e-Government	Persentase OPD yang sistem Informasinya (aplikasi) terintegrasi	71.43%	-	Tidak tersedia data
2	Meningkatnya Kualitas Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Informasi dan Komunikasi Publik yang Berkualitas	73.75%	-	Tidak tersedia data

Sumber : Diskominfo Kabupaten Sampang, 2023

Perbandingan realisasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang dengan realisasi kinerja nasional pada tahun 2023 adalah nihil karena tidak tersedia data realisasi kinerja nasional.



**Tabel 3.8.**  
**Alokasi per Sasaran Pembangunan (Cost per outcomes)**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	ANGGARAN (Rp.)	ANGGARAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatnya Penerapan e-Government	Persentase OPD yang sistem Informasinya (aplikasi) terintegrasi	9,000,066,497.00	90,02
Meningkatnya Kualitas Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Informasi dan Komunikasi Publik yang Berkualitas	997,489,795.00	9.98

*Sumber : Diskominfo Kabupaten Sampang, 2023*

Dapat dijelaskan dari tabel diatas untuk persentase capaian anggaran dapat dihitung melalui anggaran pada masing - masing indikator kinerja dibagi dengan jumlah total belanja daerah, yaitu Rp9,997,556,292.00 (termasuk anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mendukung kedua sasaran). Jadi kesimpulannya dapat diketahui persentase alokasi per sasaran pembangunan atau cost per outcome dari masing masing sasaran strategis. Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target telah tercapai, dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya. Secara umum dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan cukup efektif terhadap capaian kinerja organisasi dimana dengan anggaran di bawah 100% dapat menghasilkan kinerja 100% atau lebih seperti dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3.9.**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Kinerja			Biaya		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
Meningkatnya Penerapan e-Government	Persentase OPD yang sistem Informasinya (aplikasi) terintegrasi	65%	71.43%	109.89%	9,000,066,497.00	8,795,587,512.00	97.73
Meningkatnya Kualitas Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Informasi dan Komunikasi Publik yang Berkualitas	80%	73.75%	92.18%	997,489,795.00	977,091,054.00	97.95

*Sumber : Diskominfo Kabupaten Sampang, 2023*

**Tabel 3.10.**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>CAPAIAN KINERJA %</b>	<b>PENYERAPAN ANGGARAN %</b>	<b>TINGKAT EFISIENSI</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>
Meningkatnya Penerapan e-Government	Persentase OPD yang sistem Informasinya (aplikasi) terintegrasi	109.89	97.73	12.16
Meningkatnya Kualitas Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Informasi dan Komunikasi Publik yang Berkualitas	92.18	97.95	-5.76

*Sumber : Diskominfo Kabupaten Sampang, 2023*

Berdasarkan Tabel 3.10. di atas terlihat bahwa secara umum target kinerja Dinas Komunikasi Kabupaten Sampang Tahun 2023 dalam kategori berhasil. Walaupun ada 1 sasaran strategis yang keluaran dan hasilnya belum efektif dalam mencapai target yang ditetapkan. Pada periode selanjutnya diperlukan adanya peninjauan kembali terhadap pemilihan program dan kegiatan yang dilaksanakan, agar lebih dapat dipilih program dan kegiatan hanya yang benar-benar berkontribusi langsung terhadap pencapaian target sasaran strategis saja yang menjadi program prioritas serta mendapatkan alokasi pendanaan. Kemudian melakukan peninjauan ulang terkait alokasi anggaran yang lebih tepat sasaran agar bisa mewujudkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya.

Demikian pula halnya dengan penyerapan anggaran, terlihat bahwa secara umum realisasi <100%, sehingga dapat dikatakan bahwa program dan kegiatan sudah dapat direalisasikan secara efisien, terlihat dari serapan anggaran yang tidak mencapai 100%. Namun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa serapan anggaran yang terlalu rendah juga dapat mengindikasikan kemungkinan adanya permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga perlu ditelusuri secara lebih cermat untuk kemudian dilakukan analisis pemecahan masalah agar kelak di masa yang akan datang tidak terjadi lagi permasalahan serupa.

### **C. REALISASI ANGGARAN**

Berdasarkan DPA-Perubahan Tahun Anggaran 2023 anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp9,997,556,292.00 dan realisasi sebesar

Rp9,772,678,566.00 dengan persentase 97.75%. Untuk kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang Tahun 2023 setelah P-APBD sebagai berikut :

- a. Pendapatan Daerah..... Rp 50,000,000.00  
 c. Belanja Daerah ..... Rp. 9,997,556,292.00

Terdiri dari :

- (1) Belanja program penunjang/adum ..... Rp 3,971,061,960.00  
 (2) Belanja prioritas pembangunan ..... Rp 6,062,494,332.00

**Tabel 3.14**  
**Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika**  
**Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2023**

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	Penyerapan (%)
<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>9,997,556,292.00</b>	<b>9,772,678,566.00</b>	<b>224,877,726.00</b>	<b>97.75</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG</b>	<b>3,971,061,960.00</b>	<b>3,775,812,083.00</b>	<b>195,249,877.00</b>	<b>95.08</b>
<b>URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>				
<b>Penyusunan Dokumen</b>	<b>1,999,862.00</b>	<b>1,999,850.00</b>	<b>12.00</b>	<b>100.00</b>
<b>Perencanaan Perangkat Daerah</b>				
Belanja Alat/Bahan untuk	1,050,862.00	1,050,850.00	12.00	100.00
Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				
Belanja Alat/Bahan untuk	649,000.00	649,000.00	0.00	100.00
Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				
Belanja Alat/Bahan untuk	300,000.00	300,000.00	0.00	100.00
Kegiatan Kantor-Bahan Komputer				
<b>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</b>	<b>1,999,862.00</b>	<b>1,999,000.00</b>	<b>862.00</b>	<b>99.96</b>
Belanja Alat/Bahan untuk	1,050,862.00	1,050,000.00	862.00	99.92
Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				
Belanja Alat/Bahan untuk	649,000.00	649,000.00	0.00	100.00
Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				
Belanja Alat/Bahan untuk	300,000.00	300,000.00	0.00	100.00
Kegiatan Kantor-Bahan Komputer				
<b>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</b>	<b>999,653.00</b>	<b>998,500.00</b>	<b>1,153.00</b>	<b>99.88</b>
Belanja Alat/Bahan untuk	278,153.00	278,000.00	153.00	99.94
Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				
Belanja Alat/Bahan untuk	621,500.00	620,500.00	1,000.00	99.84
Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				
Belanja Alat/Bahan untuk	100,000.00	100,000.00	0.00	100.00
Kegiatan Kantor-Bahan Komputer				
<b>Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD</b>	<b>1,999,862.00</b>	<b>1,999,000.00</b>	<b>862.00</b>	<b>99.96</b>
Belanja Alat/Bahan untuk	1,050,862.00	1,050,000.00	862.00	99.92
Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				
Belanja Alat/Bahan untuk	649,000.00	649,000.00	0.00	100.00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	Penyerapan (%)
Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				
Belanja Alat/Bahan untuk	300,000.00	300,000.00	0.00	100.00
Kegiatan Kantor-Bahan Komputer				
<b>Koordinasi dan Penyusunan</b>	<b>999,928.00</b>	<b>999,500.00</b>	<b>428.00</b>	<b>99.96</b>
<b>Perubahan DPA-SKPD</b>				
Belanja Alat/Bahan untuk	278,153.00	278,000.00	153.00	99.94
Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				
Belanja Alat/Bahan untuk	621,775.00	621,500.00	275.00	99.96
Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				
Belanja Alat/Bahan untuk	100,000.00	100,000.00	0.00	100.00
Kegiatan Kantor-Bahan Komputer				
<b>Evaluasi Kinerja Perangkat</b>	<b>2,998,695.00</b>	<b>2,984,000.00</b>	<b>14,695.00</b>	<b>99.51</b>
<b>Daerah</b>				
Belanja Alat/Bahan untuk	1,347,143.00	1,345,000.00	2,143.00	99.84
Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				
Belanja Alat/Bahan untuk	739,052.00	739,000.00	52.00	99.99
Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				
Belanja Alat/Bahan untuk	300,000.00	300,000.00	0.00	100.00
Kegiatan Kantor-Bahan Komputer				
Belanja Makanan dan Minuman	612,500.00	600,000.00	12,500.00	97.96
Rapat				
<b>Penyediaan Gaji dan</b>	<b>2,835,316,491.00</b>	<b>2,640,905,080.00</b>	<b>194,411,411.00</b>	<b>93.14</b>
<b>Tunjangan ASN</b>				
Belanja Gaji Pokok PNS	1,287,128,595.00	1,243,114,158.00	44,014,437.00	96.58
Belanja Gaji Pokok PPPK	8,899,500.00	5,933,000.00	2,966,500.00	66.67
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	145,060,086.00	140,547,880.00	4,512,206.00	96.89
Belanja Tunjangan Keluarga	1,245,930.00	593,300.00	652,630.00	47.62
PPPK				
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	102,483,750.00	92,085,000.00	10,398,750.00	89.85
Belanja Tunjangan Fungsional	28,866,000.00	27,480,000.00	1,386,000.00	95.20
PNS				
Belanja Tunjangan Fungsional	35,739,750.00	35,355,000.00	384,750.00	98.92
Umum PNS				
Belanja Tunjangan Fungsional	555,000.00	370,000.00	185,000.00	66.67
Umum PPPK				
Belanja Tunjangan Beras PNS	89,569,057.00	86,107,380.00	3,461,677.00	96.14
Belanja Tunjangan Beras PPPK	869,040.00	289,680.00	579,360.00	33.33
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan	999,999.00	213,781.00	786,218.00	21.38
Khusus PNS				
Belanja Pembulatan Gaji PNS	14,641.00	14,557.00	84.00	99.43
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	6,000.00	88.00	5,912.00	1.47
Belanja Iuran Jaminan	2,658,432.00	2,554,981.00	103,451.00	96.11
Kecelakaan Kerja PNS				
Belanja Iuran Jaminan	21,360.00	14,240.00	7,120.00	66.67
Kecelakaan Kerja PPPK				
Belanja Iuran Jaminan Kematian	7,775,290.00	7,664,941.00	110,349.00	98.58
PNS				
Belanja Iuran Jaminan Kematian	64,077.00	42,718.00	21,359.00	66.67
PPPK				
Tambahan Penghasilan	864,678,384.00	761,560,386.00	103,117,998.00	88.07

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	Penyerapan (%)
berdasarkan Prestasi Kerja PNS				
Belanja Honorarium	194,364,000.00	173,049,000.00	21,315,000.00	89.03
Penanggungjawaban Pengelola Keuangan				
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	4,800,000.00	4,800,000.00	0.00	100.00
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	54,000,000.00	54,000,000.00	0.00	100.00
Belanja Luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2,455,200.00	2,273,326.00	181,874.00	92.59
Belanja Luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	3,062,400.00	2,841,664.00	220,736.00	92.79
<b>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</b>	<b>999,626.00</b>	<b>998,000.00</b>	<b>1,626.00</b>	<b>99.84</b>
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	511,556.00	510,000.00	1,556.00	99.70
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	488,070.00	488,000.00	70.00	99.99
<b>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</b>	<b>999,739.00</b>	<b>998,000.00</b>	<b>1,739.00</b>	<b>99.83</b>
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	511,669.00	510,000.00	1,669.00	99.67
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	488,070.00	488,000.00	70.00	99.99
<b>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</b>	<b>50,296,500.00</b>	<b>50,220,000.00</b>	<b>76,500.00</b>	<b>99.85</b>
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3,262,500.00	3,250,000.00	12,500.00	99.62
Belanja Bimbingan Teknis	30,480,000.00	30,420,000.00	60,000.00	99.80
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	16,554,000.00	16,550,000.00	4,000.00	99.98
<b>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</b>	<b>27,906,696.00</b>	<b>27,905,000.00</b>	<b>1,696.00</b>	<b>99.99</b>
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	27,906,696.00	27,905,000.00	1,696.00	99.99
<b>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>	<b>81,761,305.00</b>	<b>81,753,000.00</b>	<b>8,305.00</b>	<b>99.99</b>
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	24,858,000.00	24,850,000.00	8,000.00	99.97
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	45,578,305.00	45,578,000.00	305.00	100.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	11,325,000.00	11,325,000.00	0.00	100.00
<b>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</b>	<b>54,155,688.00</b>	<b>54,124,000.00</b>	<b>31,688.00</b>	<b>99.94</b>
Belanja Alat/Bahan untuk	34,023,936.00	34,003,000.00	20,936.00	99.94

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	Penyerapan (%)
Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Alat/Bahan untuk	2,827,230.00	2,820,000.00	7,230.00	99.74
Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover				
Belanja Alat/Bahan untuk	9,000,552.00	9,000,000.00	552.00	99.99
Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Belanja Alat/Bahan untuk	4,202,000.00	4,200,000.00	2,000.00	99.95
Kegiatan Kantor-Benda Pos Belanja Alat/Bahan untuk	4,101,970.00	4,101,000.00	970.00	99.98
Kegiatan Kantor-Bahan Komputer <b>Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan</b>	<b>38,740,725.00</b>	<b>38,563,523.00</b>	<b>177,202.00</b>	<b>99.54</b>
Belanja Alat/Bahan untuk	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	100.00
Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Alat/Bahan untuk	5,863,275.00	5,725,000.00	138,275.00	97.64
Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover				
Belanja Alat/Bahan untuk	31,677,450.00	31,638,523.00	38,927.00	99.88
Kegiatan Kantor- Bahan Cetak <b>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</b>	<b>6,300,000.00</b>	<b>6,300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	6,300,000.00	6,300,000.00	0.00	100.00
<b>Fasilitas Kunjungan Tamu</b>	<b>10,920,000.00</b>	<b>10,920,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10,920,000.00	10,920,000.00	0.00	100.00
<b>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</b>	<b>221,515,000.00</b>	<b>221,247,586.00</b>	<b>267,414.00</b>	<b>99.88</b>
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	19,082,000.00	18,979,400.00	102,600.00	99.46
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17,220,000.00	17,220,000.00	0.00	100.00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	176,423,000.00	176,348,186.00	74,814.00	99.96
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8,790,000.00	8,700,000.00	90,000.00	98.98
<b>Pengadaan Mebel</b>	<b>5,583,208.00</b>	<b>5,581,080.00</b>	<b>2,128.00</b>	<b>99.96</b>
Belanja Modal Mebel	5,583,208.00	5,581,080.00	2,128.00	99.96
<b>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</b>	<b>35,569,770.00</b>	<b>35,568,285.00</b>	<b>1,485.00</b>	<b>100.00</b>
Belanja Modal Peralatan Cetak	5,569,770.00	5,569,425.00	345.00	99.99
Belanja Modal Personal Computer	30,000,000.00	29,998,860.00	1,140.00	100.00
<b>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</b>	<b>273,789,350.00</b>	<b>273,729,415.00</b>	<b>59,935.00</b>	<b>99.98</b>
Belanja Jasa Pengolahan Sampah	0.00	0.00	0.00	
Belanja Tagihan Telepon	2,400,000.00	2,362,916.00	37,084.00	98.45
Belanja Tagihan Air	13,425,125.00	13,405,715.00	19,410.00	99.86
Belanja Tagihan Listrik	257,964,225.00	257,960,784.00	3,441.00	100.00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	Penyerapan (%)
<b>Penyediaan Jasa Pelayanan</b>	<b>69,000,000.00</b>	<b>69,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>Umum Kantor</b>				
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	24,000,000.00	24,000,000.00	0.00	100.00
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	100.00
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	27,000,000.00	27,000,000.00	0.00	100.00
<b>Penyediaan Jasa</b>	<b>76,800,000.00</b>	<b>76,784,000.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>99.98</b>
<b>Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</b>				
Belanja Jasa Tenaga Supir	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	100.00
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	12,800,000.00	12,784,000.00	16,000.00	99.88
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	55,000,000.00	55,000,000.00	0.00	100.00
<b>Pemeliharaan Mebel</b>	<b>4,960,000.00</b>	<b>4,960,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	4,960,000.00	4,960,000.00	0.00	100.00
<b>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</b>	<b>37,050,000.00</b>	<b>37,050,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	17,000,000.00	17,000,000.00	0.00	100.00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	20,050,000.00	20,050,000.00	0.00	100.00
<b>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</b>	<b>128,400,000.00</b>	<b>128,225,264.00</b>	<b>174,736.00</b>	<b>99.86</b>
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	128,400,000.00	128,225,264.00	174,736.00	99.86
<b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>850,107,352.00</b>	<b>830,796,892.00</b>	<b>19,310,460.00</b>	<b>97.73</b>
<b>Pengelolaan Media Komunikasi Publik</b>	<b>812,141,958.00</b>	<b>805,765,618.00</b>	<b>6,376,340.00</b>	<b>99.21</b>
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	8,069,010.00	8,065,000.00	4,010.00	99.95
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	2,250,000.00	2,244,375.00	5,625.00	99.75
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,329,696.00	1,308,000.00	21,696.00	98.37
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2,549,250.00	2,511,000.00	38,250.00	98.50
Belanja Alat/Bahan untuk	429,000.00	420,000.00	9,000.00	97.90

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	Penyerapan (%)
Kegiatan Kantor-Benda Pos				
Belanja Alat/Bahan untuk	2,337,500.00	0.00	2,337,500.00	0.00
Kegiatan Kantor-Alat Listrik				
Belanja Alat/Bahan untuk	0.00	0.00	0.00	
Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk				
Kegiatan Kantor Lainnya				
Belanja Makanan dan Minuman	6,930,000.00	6,906,200.00	23,800.00	99.66
Rapat				
Honorarium Narasumber atau	12,000,000.00	9,000,000.00	3,000,000.00	75.00
Pembahas, Moderator, Pembawa				
Acara, dan Panitia				
Honorarium Tim Penyusunan	292,000,000.00	292,000,000.00	0.00	100.00
Jurnal, Buletin, Majalah,				
Pengelola Teknologi Informasi dan				
Pengelola Website				
Belanja Jasa Penyelenggaraan	0.00	0.00	0.00	
Acara				
Belanja Jasa Iklan/Reklame,	244,500,000.00	244,500,000.00	0.00	100.00
Film, dan Pemetretan				
Belanja	1,600,000.00	873,000.00	727,000.00	54.56
Kawat/Faksimili/Internet/TV				
Berlangganan				
Belanja Pembayaran Pajak, Bea,	0.00	0.00	0.00	
dan Perizinan				
Belanja Sewa Hotel	0.00	0.00	0.00	
Belanja Pemeliharaan Alat Studio,	45,000,000.00	44,894,300.00	105,700.00	99.77
Komunikasi, dan Pemancar-Alat				
Studio-Peralatan Studio Video dan				
Film				
Belanja Pemeliharaan Alat Studio,	0.00	0.00	0.00	
Komunikasi, dan Pemancar-Alat				
Komunikasi-Alat Komunikasi				
Radio HF/FM				
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	103,673,000.00	103,569,953.00	103,047.00	99.90
Belanja Perjalanan Dinas Dalam	28,705,000.00	28,705,000.00	0.00	100.00
Kota				
Belanja Hibah Uang kepada	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	100.00
Badan dan Lembaga yang				
Bersifat Nirlaba, Sukarela dan				
Sosial yang Dibentuk				
Berdasarkan Peraturan				
Perundang-Undangan				
Belanja Modal Perkakas Bengkel	0.00	0.00	0.00	
Listrik				
Belanja Modal Alat Rumah	0.00	0.00	0.00	
Tangga Lainnya (Home Use)				
Belanja Modal Peralatan Studio	0.00	0.00	0.00	
Video dan Film				
Belanja Modal Peralatan Cetak	8,697,002.00	8,697,000.00	2.00	100.00
Belanja Modal Alat Komunikasi	0.00	0.00	0.00	
Radio HF/FM				



Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	Penyerapan (%)
Belanja Modal Peralatan	27,072,500.00	27,071,790.00	710.00	100.00
Komputer Lainnya				
<b>Pelayanan Informasi Publik</b>	<b>27,665,394.00</b>	<b>14,757,674.00</b>	<b>12,907,720.00</b>	<b>53.34</b>
Belanja Alat/Bahan untuk	1,684,608.00	0.00	1,684,608.00	0.00
Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				
Belanja Alat/Bahan untuk	0.00	0.00	0.00	
Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover				
Belanja Alat/Bahan untuk	2,178,786.00	1,953,000.00	225,786.00	89.64
Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				
Belanja Alat/Bahan untuk	0.00	0.00	0.00	
Kegiatan Kantor-Benda Pos				
Belanja Alat/Bahan untuk	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00
Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk				
Kegiatan Kantor Lainnya				
Belanja Makanan dan Minuman	4,750,000.00	0.00	4,750,000.00	0.00
Rapat				
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3,850,000.00	0.00	3,850,000.00	0.00
Belanja Sewa Bangunan Gedung	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	0.00
Tempat Pertemuan				
Belanja Sewa Hotel	372,000.00	0.00	372,000.00	0.00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	12,900,000.00	12,804,674.00	95,326.00	99.26
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0.00	0.00	0.00	
<b>Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik</b>	<b>10,300,000.00</b>	<b>10,273,600.00</b>	<b>26,400.00</b>	<b>99.74</b>
Belanja Makanan dan Minuman	700,000.00	673,600.00	26,400.00	96.23
Rapat				
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8,800,000.00	8,800,000.00	0.00	100.00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	800,000.00	800,000.00	0.00	100.00
<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>5,029,004,537.00</b>	<b>5,019,775,429.00</b>	<b>9,229,108.00</b>	<b>99.82</b>
<b>Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>445,807,155.00</b>	<b>444,846,661.00</b>	<b>960,494.00</b>	<b>99.78</b>
Belanja Alat/Bahan untuk	1,146,330.00	1,142,000.00	4,330.00	99.62
Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				
Belanja Alat/Bahan untuk	14,175.00	12,500.00	1,675.00	88.18
Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover				
Belanja Alat/Bahan untuk	574,750.00	574,000.00	750.00	99.87
Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				
Belanja Alat/Bahan untuk	880,000.00	871,000.00	9,000.00	98.98
Kegiatan Kantor-Benda Pos				

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	Penyerapan (%)
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5,348,000.00	5,311,000.00	37,000.00	99.31
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11,375,000.00	11,360,000.00	15,000.00	99.87
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6,200,000.00	5,750,000.00	450,000.00	92.74
Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	90,000,000.00	89,973,270.00	26,730.00	99.97
Belanja Sewa Komputer Jaringan	50,000,000.00	49,963,320.00	36,680.00	99.93
Belanja Sewa Serial	75,270,000.00	75,019,350.00	250,650.00	99.67
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	199,998,900.00	199,891,575.00	107,325.00	99.95
Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	5,000,000.00	4,978,646.00	21,354.00	99.57
<b>Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas</b>	<b>4,583,197,382.00</b>	<b>4,574,928,768.00</b>	<b>8,268,614.00</b>	<b>99.82</b>
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	16,559,000.00	16,531,470.00	27,530.00	99.83
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	1,104,000.00	1,060,000.00	44,000.00	96.01
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2,211,449.00	2,209,000.00	2,449.00	99.89
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	640,170.00	627,500.00	12,670.00	98.02
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	822,525.00	822,400.00	125.00	99.98
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1,705,000.00	1,699,000.00	6,000.00	99.65
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	55,685,375.00	55,682,097.00	3,278.00	99.99
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	50,980.00	46,900.00	4,080.00	92.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	233,165.00	215,000.00	18,165.00	92.21
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	64,675,000.00	64,642,500.00	32,500.00	99.95
Belanja Jasa Tenaga Ahli	290,000,000.00	290,000,000.00	0.00	100.00
Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	88,056,269.00	88,056,269.00	0.00	100.00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV	1,218,600,000.00	1,218,554,150.00	45,850.00	100.00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	Penyerapan (%)
Berlangganan				
Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Jaringan	70,000,000.00	68,731,200.00	1,268,800.00	98.19
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1,500,000.00	1,489,200.00	10,800.00	99.28
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	7,480,000.00	1,800,000.00	5,680,000.00	24.06
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	50,616,000.00	50,483,663.00	132,337.00	99.74
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	36,350,000.00	35,970,000.00	380,000.00	98.95
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0.00	0.00	0.00	
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	401,320,539.00	401,260,005.00	60,534.00	99.98
Belanja Modal Alat Pendingin	217,863,500.00	217,846,824.00	16,676.00	99.99
Belanja Modal Alat Studio Lainnya	11,500,000.00	11,495,160.00	4,840.00	99.96
Belanja Modal Peralatan Jaringan	74,449,410.00	73,955,970.00	493,440.00	99.34
Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	11,775,000.00	11,750,460.00	24,540.00	99.79
Belanja Modal Audio Visual	1,960,000,000.00	1,960,000,000.00	0.00	100.00
<b>PROGRAM</b>	<b>107,430,030.00</b>	<b>106,835,000.00</b>	<b>595,030.00</b>	<b>99.45</b>
<b>PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>				
<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral</b>	<b>61,872,980.00</b>	<b>61,345,000.00</b>	<b>527,980.00</b>	<b>99.15</b>
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2,917,510.00	2,900,000.00	17,510.00	99.40
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	7,217,700.00	7,140,000.00	77,700.00	98.92
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	800,370.00	780,000.00	20,370.00	97.45
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	550,000.00	550,000.00	0.00	100.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	994,400.00	990,000.00	4,400.00	99.56
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7,575,000.00	7,550,000.00	25,000.00	99.67
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	100.00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	34,218,000.00	33,835,000.00	383,000.00	98.88
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	100.00
<b>Membangun Metadata Statistik Sektoral</b>	<b>45,557,050.00</b>	<b>45,490,000.00</b>	<b>67,050.00</b>	<b>99.85</b>
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	509,850.00	500,000.00	9,850.00	98.07

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	Penyerapan (%)
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	550,000.00	550,000.00	0.00	100.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	497,200.00	440,000.00	57,200.00	88.50
Belanja Jasa Tenaga Ahli	44,000,000.00	44,000,000.00	0.00	100.00
<b>PROGRAM</b>	<b>39,952,413.00</b>	<b>39,459,162.00</b>	<b>493,251.00</b>	<b>98.77</b>
<b>PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>				
<b>Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>39,952,413.00</b>	<b>39,459,162.00</b>	<b>493,251.00</b>	<b>98.77</b>
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,371,388.00	1,371,000.00	388.00	99.97
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	198,275.00	150,000.00	48,275.00	75.65
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	849,750.00	820,000.00	29,750.00	96.50
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	550,000.00	400,000.00	150,000.00	72.73
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,750,000.00	1,500,000.00	250,000.00	85.71
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	100.00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	100.00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	29,933,000.00	29,918,162.00	14,838.00	99.95
<b>JUMLAH</b>	<b>9,997,556,292.00</b>	<b>9,772,678,566.00</b>	<b>224,877,726.00</b>	<b>97.75</b>

Sumber : SPJ Fungsional Diskominfo Kabupaten Sampang, 2023

#### D. TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL EVALUASI

Beberapa upaya yang dilakukan sebagai tindak lanjut Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.15.**

#### **Rekomendasi dan Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi SAKIP Diskominfo Tahun 2022**

Saran Rekomendasi	Tindak lanjut
<b>a. Pengukuran Kinerja</b>	<b>a. Pengukuran Kinerja</b>
1)Kualitas Pengukuran Agar pengukuran kinerja secara berjenjang dari level staf hingga level	1) Kualitas Pengukuran Pengukuran Kinerja telah Memanfaatkan teknologi informasi

Saran Rekomendasi	Tindak lanjut
<p>tertinggi menggunakan bantuan teknologi</p> <p>2) Implementasi Pengukuran</p> <p>1) Agar capaian IKU dimanfaatkan untuk penilaian kinerja dan menjadi dasar pemberian reward</p> <p>2) Agar setiap pegawai membuat pengukuran kinerja dari perjanjian kinerja yang telah dibuat</p>	<p>2) Implementasi pengukuran</p> <p>1) Implementasi Pengukuran IKU sudah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja dan menjadi dasar pemberian reward.</p> <p>2) Mulai Tahun 2024, Perjanjian kinerja Sudha dibuat sampai level staf</p>
<p><b>c. Pelaporan Kinerja</b></p> <p>Dalam laporan kinerja informasi yang disajikan agar digunakan untuk peningkatan kinerja dan penilaian kinerja</p>	<p><b>c. Pelaporan Kinerja</b></p> <p>Laporan kinerja telah menyajikan informasi sesuai standar dan informasi yang disajikan agar digunakan untuk peningkatan kinerja dan penilaian kinerja</p>
<p><b>d. Evaluasi Internal</b></p> <p>1) Lakukan pemantauan Rencana Aksi untuk mengendalikan kinerja</p> <p>2) Lakukan pemantauan Rencana Aksi untuk memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan.</p> <p>3) Meningkatkan kinerja agar target output/outcome dapat dicapai. Target kinerja yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah untuk digunakan dalam perbaikan perencanaan, menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi, sehingga dapat digunakan untuk penilaian dan peningkatan kinerja di masa yang akan datang.</p>	<p><b>d. Evaluasi Internal</b></p> <p>1) Pemantauan rencana aksi telah dilakukan untuk mengendalikan kinerja</p> <p>2) Pemantauan rencana aksi telah dilakukan untuk memberikan alternatif perbaikan</p> <p>3) Kinerja sudah mengalami peningkatan. Terbukti dari beberapa target kinerja sudah tercapai bahkan capaian sudah mencapai lebih dari 100%</p>

Sumber : Diskominfo Kabupaten Sampang, 2023

## BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang Kabupaten Sampang Tahun 2023, pada tujuan Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien dan Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan dengan sasaran Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan Meningkatnya kualitas pelayanan publik mendapat predikat nilai **Sangat Baik** dengan nilai rata-rata kinerja mencapai **100%**.

Demikian laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang Tahun 2023, semoga dapat memberikan gambaran tentang capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang dan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja dan anggaran Tahun 2023. Untuk itu pula dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada diharapkan masukan dan saran guna perbaikan dalam kinerja maupun dalam penyusunan laporan ini di masa mendatang.